

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA DPRD KOTA JAMBI)**

Panika Friantama¹⁾, Mukhzarudfa²⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi 2017*

²⁾*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

The purpose of this research are (1) to know the influence of budgeting knowledge to budgeting control (2) to know the influence of public participation on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control (3) to know the influence of public Accountability on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control. This research is a survey by distributing questionnaires directly to the sample. The population in this research are legislative assembly at provincial (DPRD) in Kota Jambi. The result of this research indicated that (1) budgeting knowledge influence to budgeting control (2) public participation influence to relationship between budgeting knowledge and budgeting control (3) public Accountability influence to relationship between budgeting knowledge and budgeting control.

Keyword: *Budgeting knowledge, public participation, public Accountability, Budgeting Control.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah, (2) untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. (3) untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan Dewan berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (2) partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (3) Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah

Kata Kunci: Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Publik, Pengawasan Keuangan Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan dari orde baru kepada orde Reformasi yang dimulai pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional sesuai prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). (Setyawati, 2010).

Otonomi Daerah tersebut di perkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan arah regulasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. (Robinson, 2006).

Otonomi diharapkan mampu mendorong daerah untuk berprakarsa lebih nyata dan mandiri dalam merumuskan berbagai prioritas strategi daerah melalui pembagian kewenangan penuh kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah diwujudkan sebagai hasil dari pendelegasian sebagian hasil dari pendelegasian sebagian urusan pusat berdasarkan perspektif yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Yuwono, Sony dkk, 2007).

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penanggaran. Sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya serta keterkaidan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemda menuangkan anggaran tersebut melalui suatu perencanaan keuangan yang dikenal dengan APBD.

Halim 2003, dalam Sopanah (2004) menyebutkan diterapkannya Undang-Undang Otonomi daerah diikuti

juga dengan pelimpahan dana. Pelimpahan dana ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran menjelaskan bahwa : 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2.) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Lembaga Legislatif dalam hal ini DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu : 1) Fungsi legislasi, 2). Fungsi Anggaran, 3) Fungsi pengawasan. Menurut H.A Kartiwa (2006), fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

PP Nomor 25 Tahun 1999 pasal 27 menyatakan bahwa APBD merupakan data terbuka yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Namun dalam penerapannya di daerah, tidak semua pihak dapat mengakses data keuangan khususnya APBD. Perilaku birokrasi yang tertutup dan kaku masih banyak diterapkan. Keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah belum berjalan. Seperti yang diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa di daerah-daerah, aparat masih memegang paradigma bahwa dokumen APBD merupakan rahasia negara dan tidak semua orang bisa mengakses informasinya. (Rahayu dkk, 2007).

Fenomena yang terjadi di Kota Jambi dalam penelitian yang dilakukan Rahayu dkk (2007) menyebutkan bahwa untuk tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dimana untuk tingkat partisipasi dalam Musrenbang yang merupakan salah satu alur prosedur dalam menyusun APBD, tingkat keterwakilan undangan yang menghadiri kegiatan Musrenbang masih rendah. Tidak seluruh pihak yang diundang menghadiri acara ini. Bahkan sebagian besar undangan hanya menghadiri kegiatan pembukaan dan pemaparan tentang kebijakan dan arah pembangunan daerah pada awal kegiatan saja.

Penelitian yang terkait dengan pengetahuan anggota Dewan Perwakilan rakyat terhadap pengawasan keuangan daerah menunjukkan keanekaragaman hasil Studi yang dilakukan Wirnana dan Murni (2007) yang meneliti pengaruh *personal background* dan *political background* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) menunjukkan bahwa strata pendidikan, latar belakang pekerjaan dan asal parpol berpengaruh signifikan terhadap pengawasan. Sedangkan jenis kelamin, usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di DPRD, ideologi parpol, dan asal komisi tidak berpengaruh secara signifikan. Yuliusman, Yudi dan Muspawi (2010). hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah

(APBD) dan interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. Sebaliknya penelitian dari Jufri dan Ali Fikri (2012), hasilnya pada artikel penelitian ini didapatkan bahwa dalam kaitan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderasi oleh variabel partisipasi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan Anggota Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah?
2. Apakah pengetahuan Anggota Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah melalui Partisipasi Masyarakat?
3. Apakah pengetahuan Anggota Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah melalui Akuntabilitas Publik?

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara (Halim,2007) adalah semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan Daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana negara dianalogikan dengan daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Permendagri 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan “bahwa Keuangan Daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”

2.2. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Mardiasmo (2002) dalam Halim Abdul (2007) mengatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu (satu tahun) dalam ukuran finansial. Aspek penting dalam pengelolaan pemerintah daerah adalah penyusunan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan anggaran daerah

merupakan uang rakyat yang dititipkan kepada daerah untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik sehingga menyangkut hajat hidup orang banyak.

2.3. Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD

Pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui *post audit* melalui pemeriksaan di tempat (Sopannah dan Mardiasmo, 2003).

2.4. Partisipasi Masyarakat

Achmadi dkk. (2002) dalam Sopannah dan Isa Wahyudi (2004) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

2.5. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas menurut *Governmental Accounting Standart Board (GASB)* dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan. (Nurliya Kartika dalam Abdul Halim, 2007).

2.6. Kerangka Pemikiran

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Menurut Sopannah (2003) dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Dengan meningkatnya pengetahuan Dewan khususnya tentang anggaran diharapkan kinerja Dewan dalam pengawasan keuangan daerah pun semakin baik.

Sopannah (2003) menyebutkan peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Rubin (1996) dalam Isa Wahyudi (2004) menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas

kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

2.7. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijabarkan maka hipotesis yang penelitian dapat dirumuskan:

- H1: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
- H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
- H3: Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Jambi. populasi yang digunakan adalah anggota DPRD Kota Jambi, terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan Komisi dan anggota yang berjumlah 45 anggota DPRD.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling Total sampling adalah tehnik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono,2010).

3.2. Variabel Penelitian

3.2.1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Anggota Dewan (X1) Kualitas anggota dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. (Indradi ,2001 dalam Sopanah (2003). Variabel Pengetahuan Anggota Dewan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Instrumen terdiri dari 4 (Empat) pertanyaan.

3.2.2. Variabel Moderasi

Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat (X2)

Partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas

kepada publik diperlukan partisipasi instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Penjarangan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk membedayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran sertamasyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. (Isa Wahyudi, 2004). Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Instrumen ini terdiri dari 7 (Item) Pertanyaan.

b. Akuntabilitas Publik (X3)

Rubin (1996) dalam Isa Wahyudi (2004) menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah dan Isa Wahyudi (2004). Instrumen ini terdiri dari 5 (Lima) item Pertanyaan.

3.2.3. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y). Implementasi pengawasan keuangan daerah perlu dilakukan secara komprehensif yaitu pengawasan saat penyusunan, tahap pelaksanaan APBD, hingga tahap pertanggung jawaban keuangan daerah. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan instrumen Sopanah (2003) instrumen pertanyaan ini terdiri dari 12 (dua belas) Item Pertanyaan.

3.3. Analisis Data

Tehnik penskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Sugiyono (2010) menyebutkan jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata berikut:

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
2. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2
3. Jawaban Tidak Tahu diberi skor 3
4. Jawaban Setuju diberi skor 4
5. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5

3.3.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian validitas

dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

3.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 2016).

3.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan terdiri dari analisis regresi sederhana dan Uji Interaksi. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Model 1} : Y_1 = a + b_1 X_1 + e$$

$$\text{Model 2} : Y_2 = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_4 (X_1 \cdot X_2) + e$$

$$\text{Model 3} : Y_3 = a + b_1 X_1 + b_3 X_3 + b_5 (X_1 \cdot X_3) + e$$

Keterangan :

- Y : Pengawasan Keuangan Daerah
- a : Konstanta
- X_1 : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
- b_1 : Koefisien Regresi
- X_2 : Partisipasi Masyarakat.
- X_3 : Akuntabilitas Publik
- $X_1 \cdot X_2$: Interaksi antara X_1 dengan X_2
- $X_1 \cdot X_3$: Interaksi antara X_1 dengan X_3
- $b_1 b_2 b_3 b_4 b_5$: Koefisien regresi
- e : Error

3.5. Uji Asumsi Klasik

3.5.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dideteksi dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, dan *Variance Inflation Factor* (VIF).. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2016) antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2016).

3.5.2. Uji Heterokedastisitas

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah *di-studentize*. Dasar analisis yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hipotesis 1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

Hasil Uji t untuk Hipotesis 1 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1

Keterangan		Nilai
Pengetahuan tentang berpengaruh pengawasan Daerah (APBD).	Dewan anggaran terhadap Keuangan	t : 5.074 Signifikansi : 0.00 Level Signifikansi 0,00 < 0.05

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Melihat data pada tabel 1 tersebut. Level signifikansi variabel pengetahuan Dewan tentang anggaran (X1) adalah sebesar 0,00 (< 0,05). Dengan demikian hal ini mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

4.1.2. Hipotesis 2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

Hasil Uji t untuk Hipotesis 2 dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 1.2

Keterangan	Nilai
Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran Pengawasan Daerah.	t : 2.245 Signifikansi : 0.030 Level Signifikansi 0,030 < 0.05

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Level signifikansi variabel interaksi pengetahuan Dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat ($X_1 \times X_2$) adalah sebesar 0,030 (< 0,05). Dengan demikian hal ini mendukung hipotesis 2 yang menyatakan bahwa interaksi pengetahuan Dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

4.1.3. Hipotesis 3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

Hasil Uji t untuk Hipotesis 3 dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3

Keterangan	Nilai
Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	t : 2.171 Signifikansi : 0.036 Level Signifikansi 0,036 < 0.05

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Level signifikansi variabel interaksi pengetahuan Dewan tentang anggaran dan akuntabilitas ($X_1 \times X_3$) adalah sebesar 0,036 (< 0,05) Hal ini mendukung hipotesis 3 yang menyatakan bahwa interaksi pengetahuan Dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik tidak terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

4.2. Pembahasan

Hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan Dewan tentang berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah.. Apabila merujuk pada Indriantono dan Supomo dalam Sopanah (2003) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Sopanah dan Isa Wahyudi (2004), Werimon (2005), Corryanata (2007), Yuliusman dkk (2010) .

Hipotesis 2 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan

pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Achmadi dkk. (2002) dalam Sopanah dan Isa Wahyudi (2004) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Sopanah dan Isa Wahyudi (2004), Werimon (2005), dan Corryanata (2007),

Hipotesis 3 menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. Rubin dalam Sopanah dan Isa Wahyudi menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Sopanah dan Isa Wahyudi (2004), dan Corryanata (2007).

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Keuangan Daerah.
2. Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Beberapa keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, keterbatasan-keterbatasan itu antara lain:

1. Jangka waktu penelitian dan pengamatan yang relatif singkat.
2. Data dengan kuisioner mungkin mempengaruhi validitas hasil dan belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya.
3. Hanya menggunakan sampel yang sedikit 45 anggota.

5.3. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu menambah Subjek di beberapa daerah / kota sehingga diperoleh responden atau sampel yang lebih banyak.
2. Bagi Para peneliti dapat menambah variabel lain untuk penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Dobell, Peter & Ulrich, 2003. *Parliament's performance in the budget process: A case study. Policy Matter: <http://www.irpp.org>. [05/06/2017]*
- Erlina, 2005. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi (Online) Volume 11, no 1.*
- Folscher Alta, Warren Krafchik & Isaac Shapiro, 2000, *Transparency And Participation In The Budget Process South Africa: A Country Report*, Budget Information Service and International Budget Project., http://www.idasa.org.za/final/publications/bis_transparency_full.htm
- Goddard, A & J Powell, 1994. *Accountability and Accounting : Using Naturalistic Methodology to Enhance Organisational Control.*, Accounting, Auditing and Accountability Journal 7 (2)
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBS SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Halim dan Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AM YKPN.
- Jufri Darma dan Ali Fikri. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderating*. *Jurnal Mediasi*. Volume 4.No1. 1 Juni 2012. Universitas negeri Medan.
- Kartiwa, A. 2006. Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance". Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia.
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).*
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Lubis, Ade Fatma. 2007. *Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*. Medan: USU Press.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Muji, Estiningsih. 2005. Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa). Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.*
- Pos Kupang. Mencermati Fungsi Pengawasan DPRD. Isodorus Lilijawa. [01/09/2014]
- Website DPRD Provinsi NTB. Abdul Hadi: DPRD perlu perkuat Fungsi Pengawasan. [12/01/2015]
- Priyatno, Duwi (2008). *Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rahayu, Sri., Unti Ludigdo dan Didied Affandi. 2007. Studi Fenomenologis Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah. In *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar.
- Riduwan. 2009. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: ALFABETA.
- Robinson. 2006. *Pengaruh kualitas Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Anggaran : Pengetahuan tentang Anggaran sebagai variabel Moderating*. Tesis Mahasiswa Universitas Diponegoro
- Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyawati, Yuni. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris di Karesidenan Surakarta)*. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta

- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. In *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Semarang.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2004. *Pengaruh Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sujianto, Agus Eko. 2009. *Aplikasi Statististik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. 2005. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 004 tentang Keuangan Negara*
- Werimon, Simson. 2005. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Thesis Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- Winarna, Jaka dan Sri Murni.2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. In *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar.
- Yuwono, Sony , Dwi , H.Suheiriy dan Azrafiany (red).2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan daerah)*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Yudono, Bambang. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (<http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela3.htm>) [03/07/ 2017]
- Yuliusman, Yudi, dan Muspawi 2010. *Pengaruh pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai variabel Moderating*. Universitas Jambi.